

Perspektif Kepemimpinan Transformasional: Fenomena Ketua RT di Wilayah Blitar

Muhammad Nasyirudin ^{1*}, Sutowo ², Abdul Aziz Al Kaharudin ³

^{1 2 3} Universitas Islam Balitar, Jawa Timur, Indonesia

* Penulis Korespondensi: hasanba1620@gmail.com

Abstrak: Ketua Rukun Tetangga (RT) merupakan bentuk kepemimpinan lokal yang memiliki peran penting dalam tata kelola sosial dan pemerintahan di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena kepemimpinan Ketua RT di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar dalam perspektif kepemimpinan transformasional, khususnya dalam pembangunan visi bersama, motivasi warga, desentralisasi peran, dan komunikasi dua arah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dari Ketua RT, warga aktif, tokoh masyarakat, dan anggota Karang Taruna pada sembilan lokasi RT. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Ketua RT di wilayah Blitar secara umum mencerminkan prinsip kepemimpinan transformasional, tetapi penerapannya bersifat adaptif dan kontekstual. Musyawarah menjadi instrumen utama dalam membangun visi bersama, meskipun partisipasi warga masih timpang antarkelompok usia. Efektivitas kepemimpinan dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya dan modal sosial, terutama gotong royong. Desentralisasi peran berlangsung secara struktural dan situasional, sedangkan komunikasi dua arah diterapkan secara selektif sesuai urgensi keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Ketua RT tidak berlangsung secara seragam, melainkan menyesuaikan karakteristik sosial, kelembagaan, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Keyword: Kepemimpinan, Transformasional, RT, Blitar

Pendahuluan

Di samping memperhatikan efek aktivitas kepemimpinan pada kehidupan kesosialan dalam masyarakat, dalam proses pembangunan tata kelola pemerintahan lokal juga dilaksanakan usaha-usaha yang memiliki tujuan agar dapat merubah struktur kelembagaan masyarakat menjadi lebih maksimal dan partisipatif. Satu diantara beberapa fondasi dalam perkembangan tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput yaitu adanya lembaga kemasyarakatan yang sampai saat ini merupakan penggerak kehidupan sosial di masyarakat, baik di desa ataupun di kota. Rukun Tetangga (RT) di Indonesia berakar dari sistem administratif masa pendudukan Jepang, yaitu Tonarigumi, yang diperkenalkan pada 8 Januari 1944 sebagai upaya mandator penduduk dalam unit

kecil berisi 10–20 rumah tangga. Setelah Indonesia merdeka, struktur serupa diadaptasi dengan tujuan berbeda, yakni untuk memperkuat mekanisme administrasi dan partisipasi warga dalam tata kelola lokal, sehingga RT kemudian berfungsi sebagai satuan sosial terkecil yang menjalankan peran administratif sekaligus sosial di lingkungan (Tempo, 2023). Dalam konteks pemerintahan modern, RT memegang peran penting sebagai penghubung pertama antara warga dan pemerintah, menjadi pintu awal dalam pengurusan dokumen administratif seperti surat keterangan domisili, pengantar identitas, hingga koordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 94 ayat (1), disebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan, pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan gotong royong masyarakat desa. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan posisi RT sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis kewilayahan di lingkup kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 371 ayat (1) yang menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan di kelurahan merupakan mitra lurah dalam pemberdayaan masyarakat, pelayanan, serta pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan (Republik Indonesia, 2014a; 2014b). Kondisi kelembagaan RT di wilayah Blitar, baik pada RT yang berada di bawah pemerintahan desa maupun RT yang berada di wilayah kelurahan (perkotaan), memperlihatkan dinamika kepemimpinan yang tidak seragam. Ketua RT di wilayah desa cenderung lebih kental dengan nilai gotong royong dan relasi sosial yang erat, sementara Ketua RT di wilayah kelurahan menghadapi karakter warga yang lebih heterogen dan tuntutan administratif perkotaan yang lebih dinamis.

Dalam kedua konteks tersebut, Ketua RT dituntut untuk tidak sekadar menjalankan fungsi administratif rutin, melainkan juga mampu membangun visi bersama, menumbuhkan motivasi partisipasi warga, serta mendorong kesadaran kolektif dalam kegiatan kemasyarakatan. Kompleksitas ini menuntut pendekatan kepemimpinan yang tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga transformasional. Model kepemimpinan transformasional merupakan salah satu bentuk kepemimpinan yang relatif baru dalam perkembangan studi kepemimpinan modern dan dipandang sebagai pendekatan yang paling komprehensif dalam menjelaskan karakteristik dan perilaku seorang pemimpin. Rafsanjani (2019) menyatakan bahwa model kepemimpinan transformasional pada hakikatnya menekankan pentingnya kemampuan seorang pemimpin dalam memotivasi bawahannya agar mampu melampaui harapan dan tanggung jawab yang dibebankan. Dalam hal ini, pemimpin transformasional diharapkan mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan, serta mengartikulasikan visi organisasi secara jelas sehingga para bawahan dapat menerima dan mengakui kredibilitas serta otoritas moral pemimpinnya.

Berbeda dengan kepemimpinan transaksional yang menekankan pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan pengikut, kepemimpinan transformasional menekankan perubahan mendasar dalam nilai, kepercayaan, dan sikap pengikut hingga tujuan organisasi dan visi pemimpin dapat diinternalisasikan dan diwujudkan secara optimal. Dalam pandangan Harsoyo (2022), kepemimpinan transformasional melibatkan proses peningkatan moralitas dan motivasi antara pemimpin dan pengikut melalui hubungan yang saling menginspirasi. Bass (1985) kemudian mengembangkan teori ini lebih lanjut dan mengemukakan bahwa kepemimpinan transaksional dan transformasional bukanlah dua kutub yang berlawanan, melainkan dua dimensi yang dapat berjalan bersamaan pada diri seorang pemimpin dalam kadar yang berbeda. Suriagiri (2020) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional memotivasi para pengikut untuk melakukan sesuatu yang melampaui harapan melalui tiga cara utama: meningkatkan kesadaran pengikut terhadap makna dan nilai dari tujuan yang ditetapkan, meminta para pengikut mengutamakan kepentingan tim atau organisasi di atas

kepentingan pribadi, serta mendorong pengikut menuju kebutuhan pada level yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan makna, aktualisasi diri, serta keterlibatan dalam pencapaian tujuan bersama.

Menurut Widayati, Rahardjo, & Febriyanti (2017), kepemimpinan transformasional memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari bentuk kepemimpinan lain, yaitu: (1) *Charismatic leadership*, di mana pemimpin memiliki daya tarik personal yang membuatnya dikagumi dan dihormati; (2) *Inspirational leadership*, yang menggambarkan kemampuan pemimpin untuk membangkitkan semangat dan motivasi pengikut; (3) *Belief*, yakni keyakinan dan intuisi kuat pemimpin dalam mengambil keputusan penting; (4) *Intellectual stimulation*, yaitu kemampuan pemimpin dalam mendorong kreativitas dan berpikir kritis di antara pengikutnya; serta (5) *Individualized consideration*, yang menunjukkan perhatian pemimpin terhadap kebutuhan individu setiap anggota organisasi. Kehadiran karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan transformasional tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga pada transformasi nilai, sikap, dan perilaku sosial di dalamnya.

Kepemimpinan transformasional juga dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu mikro dan makro. Suriagiri (2020) menjelaskan bahwa pada level mikro, kepemimpinan transformasional terjadi sebagai proses memengaruhi individu untuk menginternalisasi nilai dan visi organisasi, sementara pada level makro, kepemimpinan ini berperan dalam memobilisasi kekuatan sosial untuk mengubah sistem sosial dan mereformasi kelembagaan agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan transformasional tidak hanya berfokus pada relasi antarindividu, tetapi juga pada dinamika struktural yang membentuk arah perubahan institusional. Dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan, dinamika ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan transformasional mampu beradaptasi terhadap perubahan dan mengarahkan organisasi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berlandaskan dari permasalahan serta teori pendukung yang dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bermaksud mengkaji secara mendalam fenomena Ketua RT di wilayah Blitar, baik yang berada di lingkup desa maupun kelurahan, dengan menggunakan perspektif kepemimpinan transformasional guna memahami bagaimana visi, motivasi, desentralisasi peran, serta pola komunikasi dua arah dipraktikkan dalam kepemimpinan RT sebagai institusi sosial terkecil dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian deskriptif menurut Sahir (2021) merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena kepemimpinan Ketua RT di wilayah Blitar, baik yang berada di lingkup desa maupun kelurahan, ditinjau dari perspektif kepemimpinan transformasional. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan untuk menggali dan menggambarkan secara utuh bagaimana visi bersama dibangun, motivasi warga ditumbuhkan, desentralisasi peran dijalankan, serta pola komunikasi dua arah dipraktikkan oleh Ketua RT dalam konteks dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan yang alamiah di masyarakat.

Sumber Data dan Informan

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan informan yang dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Hardani et al., 2020). Subjek utama dalam penelitian ini adalah Ketua RT, Warga Aktif, Tokoh Masyarakat, dan anggota Karang Taruna yang berdomisili di berbagai wilayah RT di Kabupaten dan Kota Blitar. Lokasi penelitian mencakup RT. 2 RW. 4 Gaprang (Kanigoro), RT. 002 RW. 002 Ngadirejo (Kapanjenkidul), RT. 02 RW. 01 Jajar (Talun), RT. 3 RW. 3 Karangsari (Sukorejo), RT. 04 RW. 03 Jatinom (Kanigoro), RT. 1 RW. 14 Gedog (Sananwetan), RT. 01 RW. 06 Semen (Gandusari), RT. 5 RW. 3 Bendowulung (Sanankulon), dan RT. 04 RW. 01 Bendo Ponggok. Informan ini dipilih karena memiliki pengalaman langsung dan keterlibatan aktif terhadap fenomena kepemimpinan dan partisipasi sosial di lingkungan masing-masing. Sumber data sekunder berupa dokumen tertulis dan peraturan perundang-undangan yang mendukung analisis kelembagaan RT, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 43 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang akurat dan kontekstual, meliputi: (1) Wawancara, digunakan untuk menggali data secara mendalam mengenai pengalaman dan pemaknaan informan terhadap praktik kepemimpinan Ketua RT (Sahir, 2021), dilakukan secara fleksibel kepada Ketua RT, warga aktif, tokoh masyarakat, dan Karang Taruna; (2) Observasi, merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti (Abubakar, 2021), di mana peneliti terjun langsung untuk mengamati kondisi nyata aktivitas kemasyarakatan seperti musyawarah RT, gotong royong, ronda malam, serta interaksi sosial; (3) Dokumentasi, dilakukan melalui penelaahan dokumen tertulis maupun terekam yang relevan dengan penelitian (Sari et al., 2023), difokuskan pada foto kegiatan, arsip kependudukan, catatan notulensi rapat RT, serta tangkapan layar grup WhatsApp RT.

Teknik Analisis dan Keabsahan Data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari empat komponen yang berlangsung secara berkesinambungan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data diklasifikasikan ke dalam indikator kepemimpinan transformasional, yaitu: (1) pembangunan visi bersama dan motivasi, (2) faktor sosial-budaya dan kelembagaan, (3) desentralisasi peran, dan (4) pola komunikasi dua arah. Uji keabsahan data dilakukan melalui pengujian kredibilitas dengan memanfaatkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Abubakar, 2021). Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda dalam satu lokasi RT yang sama, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menguji data yang sama melalui metode pengumpulan data yang berbeda.

Hasil & Pembahasan

Hasil

Pembangunan Visi Bersama dan Motivasi Warga

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa musyawarah menjadi instrumen utama Ketua RT di Blitar dalam merumuskan visi bersama. Di RT. 2 RW. 4 Gaprang, RT. 002 RW. 002 Ngadirejo, hingga RT. 3 RW. 3 Karangsari, Ketua RT memaparkan rencana

kegiatan terlebih dahulu sebelum membuka ruang dialog. Figur Ketua RT diposisikan sebagai penggerak dialog, bukan penentu tunggal.

Namun, cakupan pelibatan warga bervariasi. Di RT. 02 RW. 01 Jajar Talun, Ketua RT secara sadar merangkul lintas generasi. Sementara di RT. 04 RW. 03 Jatinom, pelibatan warga diawali dengan sosialisasi satu arah via grup WhatsApp, baru kemudian disusul ruang tanya-jawab. Praktik yang khas ditemukan di RT. 01 RW. 06 Semen, Gandusari, di mana pembangunan visi tidak dikemas dalam rapat formal semata, melainkan dititipkan pada tradisi sosial *arisan anjangsana* dua mingguan. Forum ini berfungsi ganda sebagai ajang silaturahmi dan musyawarah, sehingga pesan kepemimpinan tersampaikan secara cair.

Meskipun demikian, keaktifan warga tidak berlangsung merata. Di RT. 02 RW. 01 Jajar Talun, RT. 3 RW. 3 Karangsari, dan RT. 1 RW. 14 Gedog, warga yang lebih tua atau tokoh masyarakat cenderung mendominasi forum, sementara kalangan muda dan warga awam lebih banyak bersikap pasif dan mengekor pada keputusan yang telah terbentuk.

Faktor Sosial, Budaya, dan Kelembagaan

Efektivitas kepemimpinan Ketua RT sangat dibatasi dan dibentuk oleh modal sosial yang ada. Pada RT yang tradisi gotong royongnya masih kuat—seperti RT. 2 RW. 4 Gaprang, RT. 3 RW. 3 Karangsari, RT. 1 RW. 14 Gedog, dan RT. 01 RW. 06 Semen—tingkat partisipasi warga tercatat sangat tinggi, mencapai kisaran 90 persen. Sebaliknya, di RT. 04 RW. 03 Jatinom, kerja bakti kolektif semakin jarang dan digantikan oleh inisiatif kebersihan mandiri di lingkup rumah tangga.

Faktor budaya juga tampil dalam bentuk manajemen keberagaman. Di RT. 01 RW. 06 Semen, kegiatan gotong royong dijalin erat dengan perayaan keagamaan lintas iman, seperti persiapan *ogoh-ogoh* yang melibatkan warga muslim maupun Hindu secara bersamaan. Sinergi ini menunjukkan bahwa keberagaman dikelola menjadi sumber kohesi sosial. Selain itu, tingkat keaktifan warga juga bergantung pada jenis kegiatan. Observasi di RT. 02 RW. 01 Jajar Talun menunjukkan kesenjangan antara partisipasi kerja bakti (tinggi) dengan ronda malam (lesu), mengindikasikan bahwa kegiatan yang berdampak langsung pada kepentingan bersama lebih mudah menggerakkan partisipasi.

Desentralisasi Peran dan Pembagian Tanggung Jawab

Praktik desentralisasi peran berlangsung dalam dua bentuk. *Pertama*, desentralisasi struktural melalui kepengurusan formal (sekretaris, bendahara, seksi), terlihat jelas di RT. 2 RW. 4 Gaprang. *Kedua*, desentralisasi situasional, yakni penunjukan penanggung jawab pada momen tertentu (koordinator lapangan, humas), ditemukan di RT. 04 RW. 01 Bendo Ponggok, RT. 5 RW. 3 Bendowulung, dan RT. 01 RW. 06 Semen. Dalam pola ini, Karang Taruna berulang kali muncul sebagai kelompok yang diberi mandat kegiatan fisik dan kreatif, dan mereka merasa dilibatkan secara bermakna, bukan sekadar pelaksana teknis.

Meski demikian, derajat desentralisasi tidak seragam. Di RT. 01 RW. 06 Semen, penunjukan penanggung jawab masih relatif terpusat pada Ketua RT, berbeda dengan RT. 02 RW. 01 Jajar Talun dan RT. 04 RW. 01 Bendo Ponggok yang lebih kolaboratif. Variasi ini menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan personal masing-masing figur.

Pola Komunikasi Dua Arah dan Musyawarah

Dua karakteristik komunikasi menonjol di seluruh wilayah penelitian. *Pertama*, penggunaan kanal komunikasi berlapis, yakni kombinasi grup WhatsApp untuk informasi rutin dan tatap muka langsung untuk hal personal atau bagi warga lansia (terlihat di RT. 02 RW. 01 Jajar Talun dan RT. 04 RW. 01 Bendo Ponggok). Suasana komunikasi cenderung terbuka dan bernuansa kekeluargaan.

Kedua, pola musyawarah berjenjang dengan mekanisme *voting* sebagai jalan terakhir. Tahapannya konsisten: penyampaian agenda, pemberian ruang pendapat, pencarian titik temu, dan pengambilan suara terbanyak jika mufakat tidak tercapai (RT. 04 RW. 03 Jatinom, RT. 5 RW. 3 Bendowulung). Pelibatan tokoh masyarakat sebagai penyeimbang juga menjadi pola yang berulang dalam keputusan sensitif. Kendati demikian, untuk hal teknis dan mendesak, keputusan tetap diambil langsung oleh Ketua RT dan pengurus demi efisiensi, tanpa melalui musyawarah penuh.

Pembahasan

Secara teoritis, Rafsanjani (2019) menegaskan bahwa pemimpin transformasional harus mampu mengartikulasikan visi agar diakui kredibilitasnya. Praktik musyawarah di Blitar mengonfirmasi asumsi ini: Ketua RT membuka ruang dialog. Namun, temuan lapangan memperlihatkan kesenjangan penting. Suriagiri (2020) menekankan keberhasilan kepemimpinan diukur dari peningkatan kesadaran pengikut secara merata. Kenyataan di Jajar Talun, Karang Sari, dan Gedog menunjukkan bahwa partisipasi aktif didominasi warga senior atau tokoh masyarakat, sementara kaum muda pasif.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses internalisasi visi (dimensi mikro kepemimpinan transformasional) belum berjalan tuntas di seluruh lapisan warga. Ketersediaan ruang dialog tidak otomatis menghasilkan kesetaraan suara. Variasi cara pelibatan warga—seperti pendekatan lintas generasi, sosialisasi via WhatsApp, hingga forum arisan—memperkuat pandangan Bass bahwa dimensi transaksional dan transformasional dapat berjalan beriringan. Praktik di Jatinom, misalnya, memperlihatkan unsur transaksional (informasi searah) yang dilengkapi elemen transformasional (ruang tanya-jawab), sebuah kombinasi pragmatis yang relevan dengan karakteristik masyarakat lokal.

Temuan mengenai tingginya partisipasi di RT yang tradisi gotong royongnya kuat sejalan dengan pandangan Suriagiri (2020) bahwa kepemimpinan transformasional pada level makro berfungsi memobilisasi kekuatan sosial yang sudah tersedia. Modal sosial berupa gotong royong menjadi prasyarat bagi efektivitas kepemimpinan. Sebaliknya, kondisi di RT. 04 RW. 03 Jatinom menjadi bukti empiris bahwa kepemimpinan transformasional tetap dibatasi oleh konteks sosial-budaya. Hal ini mengkritisi optimisme teori Bennis dan Nanus (1985) yang cenderung menonjolkan kapasitas pemimpin sebagai katalis perubahan tunggal; temuan di Jatinom menunjukkan bahwa kapasitas pemimpin memiliki batas struktural ketika modal sosial di lingkungan sudah melemah.

Fenomena di RT. 01 RW. 06 Semen, di mana gotong royong dijalin dengan perayaan lintas iman, memberi ilustrasi konkret atas konsep *individualized consideration* dan kepekaan terhadap keberagaman. Ketua RT di lokasi ini mengonversi perbedaan menjadi sumber kohesi. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional di level RT beradaptasi dengan kearifan lokal yang spesifik, bukan sekadar mereplikasi model organisasi formal. Kesenjangan partisipasi antara kerja bakti dan ronda malam juga memperlihatkan bahwa efektivitas kepemimpinan bersifat kontekstual terhadap jenis kegiatan, suatu nuansa yang jarang dieksplisitkan dalam teori Burns (1978).

Konsep desentralisasi yang ditemukan—baik struktural maupun situasional—merupakan wujud nyata dari argumen Rafsanjani (2019) bahwa kepemimpinan transformasional berfokus pada pemberdayaan. Pelibatan Karang Taruna mencerminkan ciri *intellectual stimulation* dan penumbuhan tanggung jawab.

Namun, variasi derajat pendelegasian menunjukkan bahwa pemberdayaan bukanlah kondisi biner (ada/tidak ada), melainkan spektrum yang dipengaruhi gaya personal pemimpin. Temuan ini memperkuat pandangan Bass bahwa dimensi transaksional (kontrol terpusat) dan transformasional (pendelegasian) dapat hadir bersamaan dalam proporsi yang berbeda pada satu figur kepemimpinan, alih-alih dua model yang berdiri terpisah.

Pola komunikasi berlapis (WhatsApp dan tatap muka) serta musyawarah berjenjang merupakan padanan lokal dari prinsip komunikasi dua arah (Harsoyo, 2022). Keterlibatan tokoh masyarakat sebagai penyeimbang mencerminkan pola relasi *top-down*, *bottom-up*, dan horizontal (Suriagiri, 2020).

Meski begitu, temuan bahwa komunikasi dua arah diterapkan secara selektif—penuh untuk keputusan strategis, disederhanakan untuk hal teknis-mendesak—menunjukkan adanya penyesuaian praktis. Teori kepemimpinan transformasional umumnya dikembangkan dalam konteks organisasi formal berskala besar. Tuntutan efisiensi pada satuan sosial sekecil RT memunculkan modifikasi: komunikasi dua arah dikalibrasi berdasarkan urgensi. Hal ini menegaskan bahwa penerapan kepemimpinan transformasional pada level RT bersifat pragmatis, adaptif, dan kontekstual.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kepemimpinan Ketua RT di wilayah Blitar mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional, namun penerapannya bersifat adaptif dan kontekstual, dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya, kelembagaan, serta gaya personal masing-masing pemimpin, sehingga tidak dapat dipandang sebagai model yang seragam di seluruh wilayah. Pertama, Ketua RT membangun visi bersama dan memotivasi warga terutama melalui musyawarah, di mana Ketua RT diposisikan bukan sebagai penentu tunggal, melainkan penggerak dialog. Namun demikian, cakupan pelibatan warga tidak seragam dan pada praktiknya keaktifan warga dalam musyawarah masih timpang, di mana warga senior dan tokoh masyarakat cenderung lebih dominan dibanding kalangan muda dan warga awam yang lebih banyak bersikap pasif. Kedua, efektivitas kepemimpinan transformasional Ketua RT sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya dan kelembagaan yang telah lebih dulu terbentuk di lingkungannya, terutama nilai gotong royong. RT dengan tradisi gotong royong yang kuat menunjukkan tingkat partisipasi warga yang tinggi, bahkan hingga 90 persen, sementara RT yang tradisi kolektifnya mulai melemah menunjukkan pergeseran ke arah inisiatif individual. Ketiga, desentralisasi peran dan pembagian tanggung jawab dijalankan dalam dua bentuk, yaitu desentralisasi struktural melalui kepengurusan formal dan desentralisasi situasional melalui penunjukan penanggung jawab sesuai kebutuhan kegiatan, dengan Karang Taruna kerap menjadi pihak yang diberi mandat dan merasa dilibatkan secara berarti. Keempat, pola komunikasi dua arah dan musyawarah menjadi ciri pembeda kepemimpinan Ketua RT dari gaya kepemimpinan konvensional, yang tampak melalui penggunaan kanal komunikasi berlapis (WhatsApp dan tatap muka) serta mekanisme musyawarah berjenjang dengan voting sebagai jalan terakhir, namun penerapannya bersifat selektif dan kontekstual. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, para Ketua RT perlu mengembangkan strategi pelibatan warga yang lebih inklusif, khususnya bagi kalangan muda dan warga awam yang selama ini cenderung pasif dalam musyawarah, misalnya melalui pemanfaatan media digital yang lebih interaktif atau forum-forum informal yang lebih sesuai dengan karakteristik generasi muda. Kedua, perlu adanya penguatan modal sosial di lingkungan RT yang tradisi gotong royongnya mulai melemah, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kolektif dan berdampak langsung pada kepentingan bersama agar partisipasi warga dapat kembali meningkat. Ketiga, para Ketua RT diharapkan dapat meningkatkan derajat pendelegasian wewenang secara lebih merata kepada pengurus dan warga, sehingga beban kepemimpinan tidak terpusat pada satu figur semata dan regenerasi kepemimpinan dapat berjalan secara berkelanjutan. Keempat, perlu adanya kajian lanjutan yang membandingkan secara lebih sistematis antara karakteristik kepemimpinan Ketua RT di wilayah desa dan kelurahan, guna

menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik bagi penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput.

Daftar Pustaka

- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Bennis, W. G., & Nanus, B. (1985). *Leaders: The strategies for taking charge*. Harper & Row.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu.
- Harsoyo, R. (2022). Teori kepemimpinan transformasional Bernard M. Bass dan aplikasinya dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 247–262.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rafsanjani, H. (2019). Kepemimpinan transformasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1–27.
- Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2014c). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, A., Dahlan, D., Tuhumury, R. A. N., Prayitno, Y., Siegers, W. H., Supiyanto, & Werdhani, A. S. (2023). *Dasar-dasar metodologi penelitian*. CV Angkasa.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suriagiri. (2020). *Kepemimpinan transformasional*. CV Radja Publika.
- Tempo. (2023). *Sejarah Tonarigumi dan asal-usul Rukun Tetangga di Indonesia*. Media Indonesia.
- Widayati, C., Rahardjo, T. H., & Febriyanti, M. (2017). Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 466–485.